



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
UNTUK PENILAIAN KINERJA
(Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)**

Oleh :

**PUTRI ELLA DEWI MAHARANI
02 157 014**

Mahasiswa Program Strata Satu (S - 1) Jurusan Akuntansi

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG
2010**

	No Alumni Universitas	PUTRI ELLA DEWI MAHARANI	No Alumni Fakultas
	<p align="center">BIODATA</p> <p>a). Tempat/Tgl Lahir : Padang / 31 Mei 1984 b). Nama Orang Tua : Drs. Asnu Chaier CH. SE dan Lolita Hakim c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 02 157 014 f). Tanggal Lulus : 22 Mei 2010 g). Predikat lulus : Memuaskan h). IPK : 3,11 i). Lama Studi : 7 tahun 9 Bulan j). Alamat Orang Tua : Jln. Pulau Karam No. 165 Padang</p>		

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
UNTUK PENILAIAN KINERJA
(Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)**

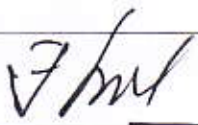
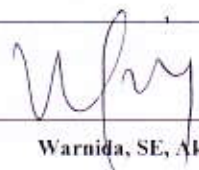
Skripsi S-1 Oleh : **Putri Ella Dewi Maharani** Pembimbing : **Firdaus, SE. M. Si, Ak**

Abstrak

Laporan keuangan meskipun sudah bersifat *general purposive*, tapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan keuangan tersebut dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan diperlukan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan, menafsirkan angka- angka dalam laporan keuangan, mengevaluasi laporan keuangan dan menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk penilaian kinerja. Data diperoleh dari kantor DPKD Sumbar yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Data dianalisis menggunakan analisis hubungan dan analisis perbandingan pos- pos laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2007 dan 2008 menunjukkan kinerja yang baik.

Keyword: *Analisis Hubungan, Analisis Perbandingan Pos- Pos Laporan Keuangan*

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 Mei 2010, dengan penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Drs. H. Fauzi Sa'ad, Ak	Warnida, SE, Ak

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi : DR. H. Yuskar, SE. MA, Ak
NIP. 19600911 198603 1001 TandaTangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

Petugas Fakultas / Universitas		
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan :
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi dan akuntabilitas publik pada era otonomi daerah telah menjadi tujuan terpenting dari reformasi sektor publik di Indonesia. Pada dasarnya, transparansi dan akuntabilitas publik tersebut tidak hanya menjadi masalah negara berkembang seperti Indonesia saja, namun negara yang sudah maju sekalipun terus berusaha memperbaiki praktek akuntabilitas sektor publiknya. Di samping itu, program-program pembangunan yang dianjurkan oleh World Bank dan UNDP saat ini juga menekankan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas sektor publik.

Di Indonesia, komitmen terhadap perbaikan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas publik mulai disuarakan sejak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut juga berdampak pada akuntansi sektor publik, yaitu perlunya pemerintah daerah melakukan pembenahan sistem akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah. Pembenahan (reformasi) akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah tersebut sangat penting dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan uang publik.

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak- pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak- pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas publik pemerintah daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak- pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak- hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan, akan tetapi juga melakukan *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability*.

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2007 dan 2008, dapat ditarik suatu kesimpulan, yakni :

1. Pada tahun anggaran 2007 dan juga tahun anggaran 2008 diperoleh SiLPA yang bersaldo positif. Hal ini mengindikasikan bahwa PemProv Sumbar memiliki kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal yang baik yang ditunjukkan dengan surplus dan pembiayaan neto yang positif.
2. Dengan seimbangny nilai setiap pos yang ada pada Neraca, baik pada tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2007, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam penyusunan Neraca oleh Pemprov Sumbar.
3. Jumlah SiLPA akhir tahun di Laporan Realisasi APBD untuk tahun anggaran 2008 dan 2007 yang sudah sama dengan jumlah SiLPA di Neraca pada kedua tahun anggaran tersebut, memberikan suatu indikasi bahwa penyusunan laporan keuangan untuk tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2007 sudah benar.
4. Dari segi realisasi pendapatan, semua pos pendapatan melampaui targetnya masing- masing, kecuali pos pendapatan retribusi daerah dan pos pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun anggaran 2008, serta pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hibah pada tahun anggaran 2007.

DAFTAR PUSTAKA

- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006, "*Standar Akuntansi Pemerintahan, Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005*", Edisi I, BPFE- Yogyakarta.
- Hafiz, Abdul Tanjung, 2007, "*Akuntansi Pemerintahan Daerah, Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*", Alfabeta, Bandung.
- Suhanda, 2007, "*Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*", Andalas Lima Sisi, Padang.
- Nordiawan, Deddi; Putra, Iswahyudi Sondi; Rahmawati; Maulidah, 2007, "*Akuntansi Pemerintahan*", Salemba Empat, Jakarta.
- Rahayu, Poppy, 2008, "*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Penilaian Kinerja (Studi Kasus pada Pemko Bukittinggi)*", Skripsi S 1 Akuntansi, ARR- 346.
- Mardiasmo, 2002, "*Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*", Andi, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 2007, "*Analisis Laporan Keuangan Daerah*", STAN, Tangerang.
- _____Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007, Padang, 2008.
- _____Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008, Padang, 2009.